



RENCANA AKSI

TAHUN 2024

Oleh

Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan
Daerah

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, telah dapat disusun tepat pada waktunya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja disusun sebagai dasar untuk mengevaluasi sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Aksi Capaian Kinerja ini dapat dijadikan pedoman terkait pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan sesuai perjanjian kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

Purwakarta, 2 Januari 2024

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURWAKARTA



NINA HERLINA
NIP. 19690101 199501 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	I-2
1.3 Sistematika Penulisan.....	I-2
BAB II RENCANA AKSI	II-4
2.1 Rencana Strategis.....	II-4
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	II-1
2.3 Perjanjian Kinerja.....	II-1
2.4 Rencana Aksi.....	II-3
BAB III PENUTUP	III-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026	II-1
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.....	II-1
Tabel 2.3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.....	II-2
Tabel 2.4 Rencana Aksi Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.....	II-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, meliputi: komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Dalam siklus manajemen pengelolaan kinerja, dimana komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi harus saling terkait, berkesinambungan dan dapat dijalankan dengan efisien dan efektif. Komponen perencanaan dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah menyusun Rencana Aksi Capaian Kinerja sebagai tindaklanjut dari ditetapkannya dokumen Perjanjian Kinerja. Rencana aksi Pencapaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024 ini memiliki peran

yang sangat penting sebagai panduan dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja tahun 2024.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan laporan rencana aksi adalah tersusunnya laporan rencana aksi atas capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan tujuan disusunnya laporan rencana aksi yaitu :

- a. Untuk merencanakan pencapaian target kinerja Tahun 2024 secara berkala;
- b. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Untuk memudahkan dalam monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja pada Tahun 2024;
- d. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.

1.3 Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Maksud dan Tujuan
	1.3 Sistematika Penulisan
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	2.1 Rencana Strategis
	2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
	2.3 Perjanjian Kinerja

BAB III

2.4 Rencana Aksi
PENUTUP

BAB II

RENCANA AKSI

2.1 Rencana Strategis

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, Bappelitbangda memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja Utama. Keterkaitan Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.1 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Renstra Bappelitbangda Kab. Purwakarta Tahun 2024-2026

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat
	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras, Harmonis, Inovatif dan Berkelanjutan	Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan	Meningkatnya Konsistensi dan Keselarasan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan
		Indeks Inovasi Daerah		Indeks Inovasi Daerah

Berdasarkan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026, bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta yaitu :

"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL
KARIMAH"

Sedangkan Misi Pembangunan Kabupaten Purwakarta yaitu : Meningkatkan Kualitas SDM yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah; Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup; Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal; Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah; dan Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda sebagai Unsur Penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, maka Bappelitbangda memiliki peranan dalam pencapaian Misi Kelima yaitu "Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat".

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mencapai target Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda setiap tahunnya, maka perlu ditunjang oleh Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan agar Kinerja Bappelitbangda dalam pencapaian target tujuan dan sasarannya dapat tercapai. Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Penanggung Jawab	Keterangan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Predikat IKM Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Sekretariat Bidang PPEPD Bidang PPM Bidang ESDA Bidang SPW	
2	Meningkatnya Konsistensi dan Keselarasan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan	Jumlah Program Yang Dilaksanakan Dalam RKPD Dibagi Jumlah Program Dalam RPD/RPJMD Dikali 100%	Bidang PPEPD Bidang PPM Bidang ESDA Bidang SPW	
		Indeks Inovasi Daerah	Nilai Hasil IID	Bidang Litbang	

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024
Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	AA
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik
Meningkatnya Konsistensi dan Keselarasan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan	Persen	100
	Indeks Inovasi Daerah	Skor/Kategori	50,62

Tabel 2.3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	AA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8	11.933.901.286
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5	Tidak Berbasis Anggaran
Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan	100 %	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3	1.694.521.275
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3	1.797.500.000
	Indeks Inovasi Daerah	50,62 Skor/Kategori	Program Penelitian dan Pengembangan	4	848.750.000

2.4 Rencana Aksi

Rencana Aksi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 yang dituangkan secara berkala (per bulan atau triwulan). Adapun Rencana Aksi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4 Rencana Aksi Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Langkah Aksi	Jadwal Pelaksanaan (Triwulanan)				Output									
			I	II	III	IV						I	II	III	IV										
1	Meningkatnya Penuhannya Dukungan Manajemen Perkantoran	Persentase Penuhannya Dukungan Manajemen Perkantoran	30%	50%	70%	88%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√	√	√	√	jumlah Dokumen Renja Murni dan Perubahan yang disusun								
									2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	√	√	√	√	jumlah Dokumen RKA Bappelitbangda yang disusun								
									3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		√	√		Jumlah Dokumen Perubahan RKA Bappelitbangda yang disusun								
									4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			√	√	Jumlah Dokumen DPA aBappelitbangda yang disusun								
									5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		√	√		Jumlah Dokumen Perubahan DPA Bappelitbangda yang disusun								
									6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√	√			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun								
									7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	√	√	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun								
									2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	50%	70%	88%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.246.875.050	Identifikasi Kebutuhan Akan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	√	√	Gaji dan Tunjangan PNS
																	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		√			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappelitbangda yang dsusun
																	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	√	√	√	√	Jumlah Dokumen yang disusun Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Langkah Aksi	Jadwal Pelaksanaan (Triwulan)				Output	
			I	II	III	IV						I	II	III	IV		
							3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000		√	√	√	√	Jumlah Dokumen yang disusun Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
									2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.000.000		√	√	√	√	Jumlah Dokumen yang disusun Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
							4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000		√			√	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan formal bagi Pegawai Bappelitbangda
									2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000			√			terlaksananya Kegiatan dalam Rangka peningkatan kapasitas aparatur perencana Pegawai Bappelitbangda
									3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	150.000.000			√			Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
									4	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25.000.000			√			Jumlah Dokumen yang disusun Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
							5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.000.000		√	√	√	√	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Bappelitbangda
									2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000				√		Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bappelitbangda
									3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.000.000		√	√	√	√	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor Bappelitbangda
									4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000		√	√	√	√	Tersedianya ATK Yang Memadai Serta Terlaksananya Penyediaan Makan dan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Langkah Aksi	Jadwal Pelaksanaan (Triwulan)				Output	
			I	II	III	IV						I	II	III	IV		
																Minum Rapat dan Tamu Kantor Bappelitbangda	
								5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	205.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	√	√	√	√	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Bappelitbangda	
								6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√	√	√	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Yang Difasilitasi	
								7	Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	√	√			Jumlah Dokumen Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
								8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		√			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
							6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Pengadaan Mebel	135.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Pengadaan Mebel				√	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
								2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				√	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
								3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			√		Jumlah Dokumen Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
							7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	√	√	√	√	Jumlah Materai dan jumlah surat kabar yang dibutuhkan
								2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	√	√	Terpenuhinya kebutuhan akan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bappelitbangda	
								3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	√	√	√	√	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	
								4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	441.862.736	Identifikasi Kebutuhan Akan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	√	√	√	√	Jumlah Premi Asuransi Bagi Pegawai Non pNS, Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor, Jumlah Tenaga Piket Malam, Jumlah tenaga	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Langkah Aksi	Jadwal Pelaksanaan (Triwulanan)				Output		
			I	II	III	IV						I	II	III	IV			
																PTT dan Jumlah Tenaga Administrasi		
							8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	√	√	√	√	Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional kantor Bappelitbangda	
									2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		√			Jumah Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor dan Pemeliharaan Taman Halaman Gedung Kantor Bappelitbangda	
									3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		√			Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan yang Harmonis dan Berkelanjutan	Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	20%	40%	60%	81%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	150.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			√	√	Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan tang Disusun
										2	Pelaksanaan Konsultasi Publik	117.500.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Pelaksanaan Konsultasi Publik	√				Jumlah Kegiatan dalam rangka Konsultasi Publik yang dilaksanakan
										3	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	80.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	√				Jumlah Kegiatan dalam rangka Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
										4	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	260.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	√				Jumlah Kegiatan dalam Rangka Musrenbang Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan
										5	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	75.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	√				Jumlah Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan yang disiapkan dari jumlah kecamatan yang dimonitoring pelaksanaan musrenbang
										6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	525.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan	√	√	√	√	jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun dan ditetapkan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Langkah Aksi	Jadwal Pelaksanaan (Triwulanan)				Output	
			I	II	III	IV						I	II	III	IV		
											Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						
							2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	77.500.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	√	√		√	Tersedianya analisis data dan Informasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
								Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2	55.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	√		√		Jumlah dokumen Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
							3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	98.605.641	Identifikasi Kebutuhan Akan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		√		√	jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan yang disusun
								Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2	45.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	√	√	√	√	jumlah dokumen laporan keterangan dan pertanggungjawaban Bupati Purwakarta yang disusun dan jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan tugas pemberitahuan, urusan bersama dan DAK	
						Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	192.500.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	√	√	√	√	Jumlah dokumen usulan perencanaan pembangunan Daerah bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2	50.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	√	√	√	√	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang diasistensi	
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3	50.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	√	√	√	√	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Langkah Aksi	Jadwal Pelaksanaan (Triwulanan)				Output
			I	II	III	IV						I	II	III	IV	
											Daerah Bidang Pemerintahan					
								4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	387.500.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	√	√	√	√	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi yang dilaksanakan
						2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	92.500.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	√	√	√	√	jumlah dokumen usulan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan SDA
						2		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	107.500.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	√	√	√	√	jumlah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang ekonomi dan SDA yang di Asistensi	
						3		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	100.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	√	√	√	√	jumlah dokumen monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan SDA	
						4		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	125.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	√	√	√	√	Jumlah Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Bidang ekonomi dan SDA	
						3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur dan Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	90.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	√	√	√	√	Jumlah Dokumen Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Langkah Aksi	Jadwal Pelaksanaan (Triwulanan)				Output									
			I	II	III	IV						I	II	III	IV										
								2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	62.500.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	√	√	√		Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
								3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	80.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	√	√	√	√	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
								4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	200.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	√	√	√	√	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur									
3	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Persentase Implementasi Kajian Pembangunan Daerah	20%	40%	50%	65%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	82.500.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		√	√	√	Jumlah Dokumen yang disusun Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi							
									2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	100.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	√	√	√	Jumlah Dokumen yang disusun Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan									
								2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	√	√	√	√	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang disusun							
										2	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	100.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	√	√	√	Jumlah Dokumen yang disusun Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja								
															3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi	1	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	100.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Penelitian dan Pengembangan		√	√	√	jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Langkah Aksi	Jadwal Pelaksanaan (Triwulanan)				Output
			I	II	III	IV						I	II	III	IV	
							dan Pembangunan				Perumahan dan Kawasan Permukiman					Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disusun
							4 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	140.000.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	√	√	√	Jumlah Dokumen Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi yang disusun
								2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	226.250.000	Identifikasi Kebutuhan Akan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	√	√	√	Jumlah Dokumen Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif yang disusun

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Kinerja merupakan dokumen yang berisikan jadwal rencana pelaksanaan perjanjian kinerja yang menyangkut sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator dan target yang ditetapkan sesuai anggaran yang telah disetujui.

Rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2024 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, serta sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja sangat tergantung dari tingkat kematangan dalam penyusunan perencanaan. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari alternatif terhadap langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta dapat mengantisipasi adanya permasalahan/ faktor penghambat yang timbul. Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Purwakarta, 2 Januari 2024

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURWAKARTA



NINAHERLINA
NIP. 19690101 199501 2 003